

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pengujian pengaruh komponen *corporate governance* terhadap *earning management*. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini:

1. MARIHOT NASUTION DAN DODDY SETIAWAN (2007)

Penelitian ini menguji mekanisme *corporate governance* dengan komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling*. Dan menggunakan metode regresi dalam pengujian hipotesis yang diajukan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan akan terjadinya manajemen laba di perusahaan perbankan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap tindak manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan perbankan. Keberadaan komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan perbankan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Marihot Nasution dan Doddy Setiawan yaitu sama-sama menguji variabel komponen *corporate governanve* yaitu komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit kecuali variabel ukuran perusahaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan sedangkan penelitian Marihot Nasution dan Doddy Setiawan menggunakan perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI.

2. Welvin I Guna dan Arleen Herawati (2010)

Penelitian ini menguji tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance*, independensi auditor, kualitas audit dan factor lainnya menacakup leverage, kualitas aditor, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dimana pemilihan sampel digunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria perusahaan yang ditentukan lalu setelah mendapatkan sampel dilakukan uji outlier untuk menentukan jumlah data yang digunakan penelitian.

Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Welvin dan Arleen menggunakan perusahaan perbankan sebagai sampel dan menggunakan variabel yang sama diantaranya kepemilikan institusi, kepemilikan

manajemen, komite audit, dewan komisaris independen kecuali independensi auditor, *leverage*, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan pada penelitian Welvin dan Arleen.

3. Yusriati Nur Farida, Yuli Prasetyo dan Eliada Herwiyati (2010)

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap timbulnya laba dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* untuk mendapatkan kriteria perusahaan yang ditentukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap *earning management*, tidak ada pengaruh antara komposisi dewan komisaris independen terhadap *earning management*, tidak terdapat pengaruh antara keberadaan komite audit terhadap *earning management*, tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba dan yang terakhir terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepemilikan manajerial terhadap *earning management*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yusriati Nur Farida, Yuli Prasetyo dan Eliada Herwiyati yaitu menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Bedanya pada penelitian ini tidak menggunakan variabel kinerja perusahaan, hanya pengaruh komponen-komponen *corporate governance* terhadap manajemen laba.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

| | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|
| Peneliti | Marihot Nasution dan Doddy Setiawan | Welvin I Guna Dan Arleen Herawati | Yusriati Nur Farida, Yuli Prasetyo Dan Eliada Herwiyati | Rainy Alfa Zulfannisa |
| Tahun | 2007 | 2010 | 2010 | 2012 |
| Variabel Y | Manajemen Laba | Manajemen Laba | Manajemen Laba | Manajemen Laba |
| Variabel X | 1. Komposisi Dewan Komisaris 2. Ukuran Dewan Komisaris 3. Keberadaan Komite Audit 4. Ukuran Perusahaan | 1. Dewan Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. Kepemilikan Institusional 4. Kepemilikan Manajemen 5. Independensi Auditor 6. Leverage 7. Kualitas Audit 8. Profitabilitas 9. Ukuran Perusahaan | 1. Ukuran dewan Komisaris 2. Komposisi Dewan Komisaris Independen 3. Komite Audit 4. Kepemilikan Institusional 5. Kepemilikan Manajerial | 1. Ukuran dewan Komisaris 2. Komposisi Dewan Komisaris Independen 3. Jumlah Komite Audit 4. Ukuran Perusahaan |
| Sampel | Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2000-2004 | Perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di BEI selama periode 2005-2007 | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2006-2008 | Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2010 |

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Brooks dan Dun (2010:135) teori keagenan merupakan suatu upaya untuk menjelaskan perilaku organisasi dan khususnya struktur tata kelola perusahaan, berdasarkan pada premis bahwa ada konflik kepentingan inheren

antara para pelaku (yang memiliki perusahaan) dan agen (yang mengelola perusahaan). Teori keagenan didasarkan pada konsep kepentingan diri sendiri, ini bukan konsep kerja sama kepentingan diri yang dikemukakan Thomas Hobbes dan Adam Smith yang mengarah kepada masyarakat sipil. Ini juga menjelaskan pentingnya pelaporan keuangan. Kedua investor dan manajer tertarik dalam memaksimalkan utilitas pribadi mereka. Investor menginginkan pengembalian yang memadai atas investasi mereka, baik dalam hal apresiasi harga saham, sehingga menghasilkan keuntungan modal atau dalam hal distribusi kas dari perusahaan melalui deviden. Manajemen sebaliknya tertarik pada kompensasi. Manajer termotivasi melalui kepentingan diri sendiri untuk melakukan pekerjaan yang baik dan mempelajari keterampilan manajerial baru sehingga mereka dapat menerima upah lebih atau pindah ke pekerjaan lain dimana mereka dapat menerima kompensasi yang lebih tinggi.

2.2.2 Good Corporate Governance

Menurut Effendi (2009:2) pengertian *good corporate governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP). Sedangkan Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009).

Nurul dan Luciana (2009) mendefinisikan *good corporate governance* merupakan suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator.

Effendi (2009:1) Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8//4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Menurut Effendi (2009) tujuan dikeluarkannya PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang –undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*ethics value*) yang berlaku umum pada industri perbankan.

Good corporate governance menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8//4/PBI/2006 memiliki lima prinsip dasar diantaranya

- A. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
- B. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

- C. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- D. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank yang secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- E. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam PBI tersebut juga dijelaskan bahwa dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* peraturan Bank Indonesia Nomor 8//4/PBI/2006 setidaknya harus diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
4. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengendalian intern
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis bank
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

Penerapan *good corporate governance* ini tidak terlepas dari adanya peran dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, pejabat eksekutif dan komite audit serta pengelola intern lainnya, dimana masing-masing ditugaskan dengan tanggungjawab dan wewenang yang berbeda-beda dalam mengelola perusahaan. Indikator-indikator tersebut memungkinkan tindak manajemen dalam melakukan manajemen laba.

2.2.3 Konsep Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance*

Bank Indonesia telah menguraikan pengukuran kualitas *good corporate governance* dalam perusahaan pada Peraturan Bank Indonesia yang diprosikan dengan indikator-indikator yang menjadi variabel dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur (Yusriati, Yuli dan Eliada, 2010). Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan dengan kualitas yang baik (Hari, 2012). Sehingga dewan komisaris juga melakukan secara ketat tindakan-tindakan manajemen dalam mengelola laporan keuangan. Oleh karena itu ukuran dewan komisaris atau jumlah dewan komisaris akan mempengaruhi proses pengawasan terhadap perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah total anggota dewan komisaris internal maupun eksternal dari sampel perusahaan

$$\text{UDK} = \text{JUMLAH DEWAN KOMISARIS}$$

2. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Dalam Peraturan Bank Indonesia No No. 8//4/PBI/2006, komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Komposisi dewan komisaris pada penelitian ini diukur dari jumlah total persentase dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris.

$$KDKI = \frac{\text{KOMISARIS INDEPENDEN}}{\text{KOMISARIS}} \times 100\%$$

3. Jumlah Komite Audit

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No No. 8//4/PBI/2006 tugas komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu apakah jumlah komite audit akan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

4. Kepemilikan Manajerial

Merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen dapat dihitung dari jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham yang beredar.

$$KM = \frac{\text{SAHAM IDIREKSI \& KOMISARIS}}{\text{JUMLAH SAHAM BEREDAR}} \times 100\%$$

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusional (eksternal), seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi dan lembaga lain (Imanta, 2011). Kepemilikan institusional diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan dengan total saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{SAHAM INSTITUSI}}{\text{JUMLAH SAHAM BEREDAR}} \times 100\%$$

2.2.4 Earning Management

Manajemen laba perusahaan adalah tindakan manajer untuk merekayasa laba dengan memunculkan laba lebih tinggi dari yang seharusnya. Biasanya manajer melakukan manajemen laba karena laba yang dihasilkan tidak sesuai dengan target laba yang ditentukan sebelumnya. Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara, manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional.

Tindakan ini tidak lebih dari keinginan manajer untuk menarik minat investor atas laba yang menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin meningkat setiap periodenya. Tindakan ini juga dapat menyesatkan pemegang

saham eksternal dalam keputusan yang diambil, karena laporan keuangan adalah bentuk sarana pengkomunikasian antara manajer dengan pemegang saham. Dan akan dapat memicu konflik ketika suatu ketika pemegang saham mengerti kondisi perusahaan yang sebenarnya dan laba yang dihasilkan adalah hasil dari perekayasaan manajer. Menurut Deddy, Yeni dan Liza (2011: 40), manajemen laba bisa dilakukan dengan membesarkan atau mengecilkan laba dan bisa juga dengan melakukan perataan laba. Menurut Scott (1997) terdapat empat pola manajemen yaitu:

1. Pola *taking a bath*.

Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini dapat digunakan oleh perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan. pola ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghapusan (*write off*) terhadap asset tertentu dan membebankan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh kinerja yang baik di masa yang akan datang saat kondisi perekonomian lebih menguntungkan.

2. Pola *income minimization*

Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Pola ini relatif sering digunakan karna motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi maka mnajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui

penghapusan asset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan.

3. Pola *income maximization*

Pola ini dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya dengan menggunakan teknik yang beragam. Misalnya dengan cara menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba sampai dengan meningkatkan jumlah produksi dan penjualan.

4. Pola *income smoothing*

Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relatif stabil. *Income smoothing* bisa dikatakan merupakan upaya untuk menetralkan keadaan lingkungan uang yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk investor dan kreditur yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan, dalam dunia keuangan, fluktuasi mencerminkan ketidakpastian sehingga makin fluktuatif laba, perusahaan dapat dikatakan berisiko. Demi menjaga agar laba tidak fluktuatif, maka stabilitasnya harus dijaga.

Menurut Deddy, Yeni dan Liza (2011:31), ada beberapa motivasi dilakukannya manajemen laba yaitu:

1. Motivasi program bonus

Motivasi ini dilakukan pada suatu kondisi manajer ingin mendapatkan bonus yang besar dari pemegang saham dari evaluasi atas kinerja manajer

dalam menjalankan operasional perusahaan. kinerja manajer salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha.

2. Motivasi perpajakan

Motivasi ini menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata yaitu perusahaan ingin meminimalisasi laba agar pajak yang dibayarkan juga minimal.

3. Motivasi perjanjian utang

Motivasi untuk mengecilkan laba juga bisa karena alasan yang bertujuan untuk memenuhi perjanjian utang yang timbul dari kontrak utang jangka panjang.

4. Motivasi penjualan saham

Motivasi ini digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun yang akan *go public*. Keinginan perusahaan didalam memperoleh modal usaha dari investor dengan cara menjual sahamnya maka dilakukan manajemen laba dengan menunjukkan laba yang besar. Agar investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut.

5. Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi sekitar periode pergantian direksi. Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung memaksimalkan laba agar terlihat baik di akhir masa jabatannya. Motivasi ini bertujuan untuk memperoleh bonus yang maksimal di akhir masa jabatannya.

6. Motivasi Politis

Manajer cenderung menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, terutama selama periode kemakmuran tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media atau konsumen yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis karena rendahnya biaya politis akan menguntungkan manajemen.

Memang perusahaan suatu waktu dihadapkan pada kondisi dimana manajer termotivasi untuk melakukan manajemen laba dan melakukan kesengajaan praktik manajemen laba pada laporan keuangannya maka dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan tersebut. Karena informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* adalah informasi yang tidak menyesatkan, jujur dan dapat diandalkan. Manajemen laba dapat dilakukan melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktifitas riil perusahaan. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dilakukan oleh manajemen dengan melakukan teknik permainan laba serta kebijakan akuntansi.

Untuk mendeteksi adanya perilaku manajemen laba dalam perusahaan dapat dilakukan menggunakan pengukuran total akrual. Total akrual merupakan selisih laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Pengukuran total akrual dapat dibedakan menjadi dua yaitu *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. Yang, Chun dan Ramadhili (2009) mengatakan pernyataan berikut:

The magnitude of discretionary accruals is indicated as a percentage of assets of a firm. The higher the value of discretionary accruals, the greater the earnings is manipulated. Earnings management may take the form of either income-increasing or income-decreasing accounting choices.

Income-increasing manipulation means positive discretionary accruals whereas income-decreasing indicate negative discretionary accruals

Yang berarti bahwa besarnya akrual diskresioner diindikasikan sebagai presentase dari aset perusahaan. Semakin tinggi nilai akrual diskresioner, semakin besar laba yang dimanipulasi. Manajemen laba dapat berupa pilihan akuntansi dengan laba yang meningkat atau menurun. Laba meningkat berarti manipulasi akrual diskresioner positif sedangkan penurunan pendapatan mengindikasikan akrual diskresioner negatif. *Non discretionary accruals* yaitu adalah komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya. *Discretionary accruals* adalah komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Welvin dan Arleen, 2010).

2.3 Kerangka Pemikiran

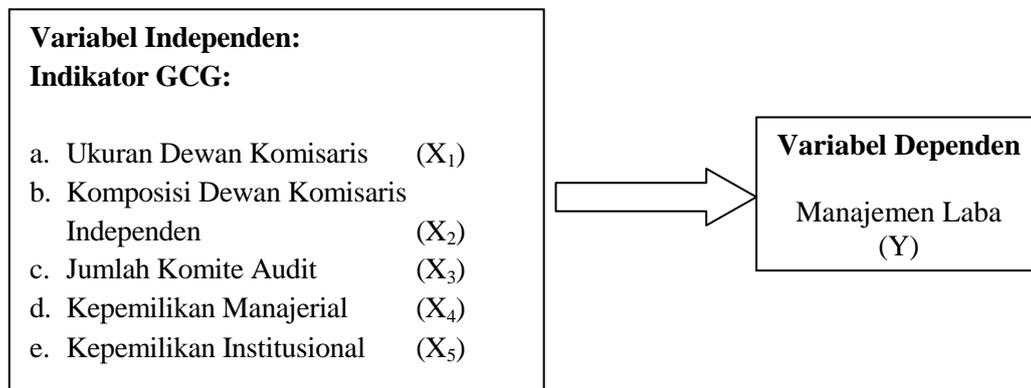
Tujuan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan perbankan adalah untuk melindungi segenap kepentingan stakeholder atas hak-haknya dalam memperoleh deviden saham. Dan *good corporate governance* ini memiliki indikator-indikator yang

dijadikan variabel independen dalam penelitian ini, diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris dan manajemen laba sebagai variabel dependen.

Semua variabel yang digunakan tersebut diduga dapat mempengaruhi tindak kecurangan oleh pihak manajemen dalam memanipulasi laba. Di dalam konflik keagenan dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan *stakeholders*. *Stakeholders* memiliki kaitan secara langsung terhadap ekuitasnya didalam perusahaan, sehingga sangat dibutuhkan informasi perusahaan yang transparan, andal, dapat dipercaya, akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pihak internal dan manajemen perusahaan hanya berprospek pada bagaimana perusahaan tersebut dapat memiliki kelangsungan usaha dan terkategori pada perusahaan yang sehat serta tujuan tertentu pihak manajemen dalam memperoleh bonus atas laba yang besar.

Sehingga hubungan keduanya ini dapat menimbulkan terjadinya informasi asimetri. Informasi asimetri ini terjadi karena pihak manajemen yang tidak menyediakan informasi secara relevan dan transparan kepada publik, sehingga *stakeholders* tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga peneliti ingin melakukan pengujian terhadap kelima variabel ini apakah memiliki pengaruh dalam mengurangi tindak manajemen laba pada perusahaan perbankan. Dan berikut adalah kerangka pemikiran yang dapat peneliti gambarkan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis atas penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Dengan Manajemen Laba

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah keseluruhan dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris pada perusahaan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian Marihot dan Doddy (2007) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba, artinya perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran dewan komisaris mempengaruhi praktek manajemen laba

2. Hubungan Komposisi Dewan Komisaris Independen Dengan Manajemen Laba

Sebagaimana dengan penjelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yaitu memantau, mengevaluasi pihak manajemen untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang baik. Pihak manajemen juga memiliki kepentingan yang akan berujung dengan tindakan memanipulasi laba sehingga akan mengurangi kepercayaan investor atas kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu (Marihhot dan Doddy 2007) membuktikan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yaitu berarti semakin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan berhasil mengurangi praktik manajemen laba. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Komposisi dewan komisaris independen mempengaruhi praktek manajemen laba.

3. Hubungan Jumlah Komite Audit Dengan Manajemen laba

Keberadaan fungsi komite audit pada perusahaan di sektor perbankan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Herni dan Susanto (2008) telah membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan melakukan manajemen laba yang efisien daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Jumlah komite audit dapat mempengaruhi praktek manajemen laba

4. Hubungan Kepemilikan Manajerial Dengan Manajemen Laba

Pihak manajemen adalah pihak yang berhubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer/manajemen, dengan kata lain manajer juga bertindak sebagai pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham (Dea, 2011). Hasil penelitian Ujijanto dan Pramuka (2007) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan adanya kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi praktek manajemen laba

5. Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan Manajemen laba

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Dengan adanya kepemilikan pihak institusi maka akan mempengaruhi pihak manajemen dalam praktik manajemen laba. Investor institusional yang sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional (Herawaty,

2008). Penelitian Yusriati (2010) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

H₅ : Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi praktek manajemen laba.